

Analisis preferensi masyarakat pengguna JPSA Keimigraisan terhadap Penghapusan asas domisili pemohon surat perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kela I Jakarta Timur = Analysis of customer's preference towards the appropriate between identity card and immigration territory abolishing policy at east Jakarta Immigration Office

Yan Wely Wiguna, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20338880&lokasi=lokal>

Abstrak

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sadar akan pentingnya peningkatan pelayanan dan berusaha mendekatkan diri pada masyarakat. lembaga lni juga selain tercatat aktif melakukan berbagai kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat atas peraturan keimigrasian dimana Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga tercatat sebagai anggota Sadan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kementerian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia.

Walaupun aktif melakukan penyebaran Informasi kepada masyarakat namun tetap ada beberapa hal yang esensial atas pelayanan yang diberikannya belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat. Adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : M.08-IZ.03.10 TAHUN 2006 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.OI-IZ.03.10 Tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, Dan surat Perjalan laksana Paspor Untuk Orang Asing yang menyatakan bahwa permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan di kantor imigrasi manapun dengan ketentuan syarat - syarat dasar berupa kepemllikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta lahir atau ijasah terpenuhi.

Kemudahan yang ditawarkan oleh Kementerian ini seharusnya menyebabkan adanya penyebaran permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau paspor Republik Indonesia pada kantor - kantor yang volume kerjanya tidak terlalu tinggi namun kemudahan ini beberapa tahun setelah pelaksanaannya tidak menimbulkan penyebaran permohonan sebagaimana diharapkan.

DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara memiliki beberapa kantor imigrasi kelas I Khusus dan kelas I yang setiap tahun kegiatan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh kantor - kantor ini mengalami peningkatan bahkan menyumbang sekitar 20% dari total penerbitan paspor di seluruh Indonesia. Seiring diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut diatas diharapkan masyarakat memiliki alternatif untuk mendaftarkan permohonannya pada kantor - kantor yang dianggap menguntungkan bagi dirinya.

Riset ini bertujuan? untuk menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan tidak terjadinya penyebaran permohonan ke kantor- kantor lmigrasi lain yang ada di seputar DKI Jakarta melalui analisa perilaku konsumen jasa oleh Fandy Ijiptono. Kerangka analisa ini melipui 5 (lima) dimensi yaitu : identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan konsumsi serta evaluasi purnabeli. Dalam riset ini,data kuantitatif yang diperoleh dari survei dianalisis dengan menggunakan metode rata- rata (mean) yang kemudian dilakukan pembobotan guna mendapatkan data yang lebih baik untuk selanjutnya

hasil kuantitatif akan lebih diperinci dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

<hr>

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah salah satu direktorat dalam Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sadar akan pentingnya memberikan layanan dan memperkuat ikatan dengan masyarakat. Institusi ini juga aktif dalam menyebarkan berbagai aktivitas ke publik tentang regulasi imigrasi. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga terdaftar sebagai anggota Koordinasi Agen Perilaku Publik di Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Walaupun aktif dalam memberikan informasi kepada publik tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.O8-HZ.03.10 TAHUN 2006 mengenai Perubahan Keempat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.OI-IZ.03.10 Tentang Paspor Biasa, yang menyatakan bahwa pengajuan paspor dapat dilakukan di kantor imigrasi dengan persyaratan kepemilikan Kartu Identitas (ID), Kartu Keluarga (KK) dan surat lahir atau sertifikat kelahiran.

Kelenturan yang ditawarkan oleh Kementerian untuk mengajukan paspor di kantor imigrasi diharapkan akan menstimulus penyebarluasan paspor Republik Indonesia. Meskipun demikian, volume kerja yang tidak terlalu besar tetapi hasil implementasi yang tidak sesuai dengan perkiraan.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki beberapa kantor imigrasi khusus yang setiap tahunnya mengeluarkan jumlah paspor yang cukup banyak. Pada tahun 2006, jumlah paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi di DKI Jakarta mencapai sekitar 20% dari total paspor yang dikeluarkan di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kantor imigrasi di DKI Jakarta menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengajukan paspor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarluasan paspor di kantor imigrasi di luar DKI Jakarta melalui analisis perilaku konsumen oleh Fandy Tjolpono. Model analisis ini mencakup lima dimensi: identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan konsumsi, serta evaluasi setelah pembelian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan metode kuantitatif melalui survei.